

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Objek penelitian ini adalah BPKAD Se-Bakorwil V Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 7 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Situbonso, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo. Sampel pada penelitian ini sebanyak 79 orang pada bidang akuntansi. Metode pengumpulan data dari penelitian menggunakan data primer dengan penyebaran kuesioner menggunakan link *g-form* dan pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kerangka baku yang dimiliki oleh standar akuntansi pemerintah dapat memastikan penyusunan laporan keuangan memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Konsistensi dalam penerapan standar akuntansi pemerintah serta pemahaman yang baik dari para pelaksana teknis turut berkontribusi pada penyajian informasi keuangan yang lebih akurat, relevan, dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Selain itu, penerapan standar ini juga membantu mengurangi asimetri informasi antara pengelola keuangan (*agen*) dan pemangku kepentingan (*prinsipal*), seperti masyarakat dan lembaga pengawas. Dengan demikian, laporan keuangan yang sesuai standar tidak hanya meminimalkan risiko penyimpangan informasi tetapi juga mencegah terjadinya *moral hazard* dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Laporan yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang baik memperkecil kemungkinan terjadinya manipulasi data atau penyajian informasi yang menyesatkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wulandari & Octaviani (2020) yang menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi berbasis akrual secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintahan yang dirancang secara terstruktur dan diimplementasikan secara efektif memegang peranan krusial dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Meliputi seluruh tahapan mulai dari pengumpulan data, pencatatan, hingga penyusunan laporan sistem ini mampu menghasilkan informasi yang andal dan tepat waktu apabila dijalankan sesuai prosedur. Dalam perspektif teori asimetri informasi, keandalan sistem akuntansi membantu mengurangi ketimpangan akses informasi antara *agen* (pengelola keuangan) dan *prinsipal* (pemangku kepentingan). Dengan menyajikan data keuangan secara objektif dan sistematis, sistem ini membatasi peluang *agen* untuk melakukan manipulasi data. Sistem akuntansi yang kuat tidak sekadar berfungsi sebagai sarana pencatatan, melainkan juga menjadi

mekanisme pengendalian yang mencegah distorsi informasi dalam pelaporan keuangan. Jika sistem yang berjalan optimal, setiap transaksi dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Penelitian ini diperkuat oleh hasil riset Lantu (2023) serta Ira Gustina (2021), yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang diterapkan dengan baik dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara signifikan.

3. Penerapan kompetensi sumber daya manusia telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia memegang peranan sentral dalam menjamin kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hanya tenaga ahli yang memiliki pengetahuan mendalam, keterampilan memadai, dan integritas profesional di bidang akuntansi yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi ini tidak hanya terbatas pada penguasaan teknis akuntansi, melainkan juga mencakup pemahaman menyeluruh terhadap regulasi serta kemampuan mengaplikasikan sistem akuntansi berbasis teknologi terkini. Dalam perspektif teori asimetri informasi, ketidakmampuan SDM menjadi penyebab utama ketimpangan informasi, karena laporan keuangan justru disusun oleh pihak yang tidak menguasai standar dan prosedur yang semestinya. Sebaliknya, SDM yang kompeten akan menghasilkan laporan yang andal dan transparan, sehingga secara signifikan mengurangi peluang penyalahgunaan data keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Apriansyah et al. (2020) dan Kasse et al. (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM secara signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, khususnya dalam proses konsolidasi data dari OPD ke BPKAD. Oleh karena itu, program pengembangan kapasitas SDM secara berkelanjutan harus menjadi prioritas strategis guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel.

## 5.2 Saran

1. Bagi BPKAD Se-Bakorwil V Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan pegawai bagian keuangan untuk lebih memahami standar akuntansi pemerintah dengan mengikuti berbagai pelatihan mengenai standar akuntansi pemerintah.
2. Bagi BPKAD Se-Bakorwil V Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam proses penyusunan laporan keuangan serta menjaga kompetensi sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan menempatkan latar belakang akuntansi untuk bidang akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan dengan tepat waktu dan memiliki kualitas yang baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, berdasarkan penelitian ini faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah hanya dapat dijelaskan sebanyak 36,4% dari ketiga variabel yang dilakukan dalam pengujian. Sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan lebih baik.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada instansi pemerintah daerah yang berada di wilayah Bakorwil V Jawa Timur, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada tiga variabel independen, yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sistem akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia. Masih terdapat variabel lain yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah yang tidak dikaji dalam penelitian ini, seperti peran audit internal, pengawasan eksternal, dan budaya organisasi.
3. Pendekatan kuantitatif berbasis kuesioner yang digunakan tidak memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap sudut pandang subjektif responden. Akibatnya, aspek kualitatif dari fenomena yang diteliti tidak terekam secara optimal.

